



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana.....	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yatusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yayusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969

ABSTRAK

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963–1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963–1969.

Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron**

AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masih terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang

kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

DDC: 320.5

Djuneidi

MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung "perang verbal", "perang politik identitas" yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963–1969****ABSTRACT**

Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorla) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?

Keywords: *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron****THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT****ABSTRACT**

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.

Keywords: *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

STRENGTHENING INDONESIA'S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: *democracy, cyber law, cyber democracy*

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: *decentralization, national identity, regional autonomy*

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation

allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: barter, transnational crime, border

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

ABSTRACT

All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.

Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

DDC: 320.5

Djuneidi

MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.

AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

Damianus Benediktus Gene Djo¹ dan Eusabius Separera Niron²

1Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya

E-mail: djonandy@gmail.com

2Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya

E-mail: esthonniron@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.

Keywords: *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masih terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: *konflik Papua, tindakan represif, dialog*

PENDAHULUAN

Masyarakat Papua sejatinya merindukan sebuah kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Kerinduan ini muncul sebagai akibat dari konflik berkepanjangan yang sudah dan sedang terjadi di *tanah Papua*¹. Secara historis, konflik di tanah Papua sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda hingga Reformasi. Bahkan, menurut Heidbuchel (dalam Budiarti, 2017) konflik yang terjadi ini juga merupakan konflik separatistis terlama yang terjadi dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, jikalau

dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Aceh dan Timor Timur. Konflik yang berkepanjangan ini, kemudian menarik untuk diteliti dan dicari akar persoalannya guna menemukan jalan keluar atas konflik tersebut. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjadi salah satu lembaga yang telah melakukan penelitian atas persoalan di tanah Papua selama lima tahun terhitung sejak tahun 2004. Hasil temuan dari penelitian ini dibukukan dalam *Papua Road Map (PRM)* yang ditulis oleh Muridan S. Widjojo (dalam Budiarti, 2017), menyebutkan bahwa ada empat isu strategis yang melatarbelakangi konflik Papua

¹ Term *tanah Papua* pada tulisan ini merujuk pada wilayah teritorial Papua dan Papua Barat.

yakni sejarah integrasi Papua ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), gagalnya pembangunan di Papua, dan inkonsistensi dari pemerintah dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus), serta marjinalisasi orang Papua.

Bertolak dari empat isu strategis tersebut, terdapat empat agenda penyelesaian konflik Papua yang ditawarkan yaitu: 1) rekognisi yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) sebagai kompensasi atas marjinalisasi dan diskriminasi yang mereka alami; 2) pembangunan paradigma baru dengan orientasi pada pemenuhan hak dasar rakyat Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik; 3) dialog yang dilandasi rasa saling percaya sebagai bagian dari upaya berdamai dengan sejarah masa lalu dan untuk menyamakan persepsi melihat masa depan; 4) rekonsiliasi yang berorientasi pada pengungkapan kebenaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua dan kesediaan otoritas negara untuk mengakuinya sebagai kekeliruan masa lalu (Widjojo, 2009). Berdasarkan laporan dari buku *Updating Papua Road Map*² yang diterbitkan oleh LIPI pada tahun 2017, agenda penyelesaian konflik terutama dialog antara Pemerintah dan masyarakat Papua pernah ditawarkan kepada pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ir. Joko Widodo. Namun, hingga kini dialog yang diharapkan tidak kunjung terlaksana. Padahal, dialog merupakan jalan untuk menemukan akar masalah dan solusi atas konflik di tanah Papua.

Akan tetapi, dalam penyelesaian konflik Papua pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi. Pendekatan represif yang dilakukan sebenarnya tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif yang dilakukan oleh negara di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun,

tindakan represif ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif tersebut. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu 1) tindakan represif negara dan pelanggaran HAM; 2) persoalan pembangunan; 3) bangkitnya nasionalisme bangsa Papua.

TINDAKAN REPRESIF NEGARA DAN PELANGGARAN HAM

Papua adalah daerah terakhir yang menyatakan diri untuk masuk dalam NKRI. Masuknya Papua ke dalam NKRI melalui perjanjian internasional yaitu Perjanjian New York pada tahun 1962. Berdasarkan catatan sejarah, Perjanjian New York tidak berjalan mulus karena terdapat sengketa. Sengketa dari perjanjian New York dimulai ketika terdapat ketidaksetujuan dari Dewan Papua Nieuw Guinea atas pembahasan proposal Bunker³ dan masa depan Papua antara beberapa tokoh Papua dan Belanda.⁴ Terkait dengan proposal Bunker, Dewan Papua Nieuw Guinea ingin masyarakat Papua untuk dilibatkan dalam proses tersebut dan mendapatkan hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini dikarenakan

³ Isi dari proposal Bunker menyarankan agar Belanda dan Indonesia duduk bersama mengakhiri perselisihan perebutan Papua dan penyerahan administrasi pemerintahan dari Belanda kepada Indonesia melalui sebagai mediator dalam dua tahun, serta pada tahun kedua pemerintahan interim PBB ini akan diganti dengan pegawai-pegawai Indonesia dan terakhir akan dilakukan penyerahan kendali administrasi penuh kepada Indonesia. Materay (2011), Drooglever (2009) dalam, Pakey, *Papua Mencari Jalan Perdamaian: Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cenderawasih* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 84-85.

⁴ Terkait dengan ini, berdasarkan Dewan Papua Nieuw Guinea mengeluarkan lima poin resolusi: (1) Papua akan menambah wakil permanennya di PBB, (2) Pemerintah Indonesia harus menghentikan agresi militer di wilayah Papua, (3) tidak adanya penyelesaian konflik Indonesia-Belanda tidak dapat diterima kecuali ada jaminan kebebasan atas hak menentukan nasib sendiri bagi orang Papua, (4) sukarelawan korps Papua dalam waktu singkat akan meningkat menjadi 1.200 orang, (5) Dewan Nieuw Guinea akan mengirim delegasi untuk menjelaskan pandangan orang Papua kepada Pemerintah Indonesia. Pakey, *op.cit.*, hlm. 29.

² Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UPRM

terdapat kepentingan elit yang tidak bisa diartikan sebagai suara seluruh masyarakat Papua.

Perjalanan sejarah sosial dan politik masyarakat Papua selama kurun waktu 1962-1969 antara masa integrasi Papua merupakan masa yang sangat buruk dan suram. Dalam benak masyarakat Papua pengalaman integrasi merupakan pengalaman mimpi buruk selama delapan tahun yang mencekam di bawah “lars” dan “laras” kezaliman, karena selama itu realitas politik, hukum, dan kemanusiaan di tanah Papua sarat dengan berbagai pelanggaran HAM, peniadaan hak sejarah, hak politik, hak atas keadilan, hak budaya, serta hak rakyat di bidang sosial ekonomi. Kejahatan sistemik terhadap kemanusiaan di Papua terus dipertahankan serta dibawah tekanan dan stigmatisasi sebagai separatis, bodoh, malas, buta huruf, terbelakang, dan terasing (Pakey, 2018, 44).

Perjanjian New York yang diprakarsai oleh Amerika yang kemudian hari menjadi landasan bagi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pepera tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian New York. Drooglever dalam Pakey (2018, 92-93) menyebutkan bahwa pada tahun 1962-1969 terjadi suatu proses penyimpangan dari ketentuan perjanjian New York yang mengatur bahwa Papua akan segera dialihkan oleh Belanda kepada PBB dan pada akhir tahun 1969 akan dilakukan apa yang diinginkan oleh Belanda sebagai suatu proses plebisit, yaitu *one man one vote*, tetapi kemudian diubah menjadi *act of free choice* yang menjamin rakyat Papua, berdasarkan praktik internasional, untuk memilih sesuai hati nurani, apakah merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Namun, yang terjadi adalah Pemerintah Indonesia menggerakkan seluruh kekuatan politik dan militer untuk untuk memenangkan Pepera tersebut.

Selain itu, pelaksanaan Pepera juga jauh dari kata demokratis. Karena menjelang Pepera dan sampai pada pelaksanaan Pepera, terjadi kekerasan militer terhadap orang Papua. Pelaksanaan *act free choice* sarat dengan pelanggaran HAM berupa pembunuhan, pengintimidasi-an, pemaksaan, penghilangan, penculikan, dan bentuk politik uang lainnya (Pakey, 2018, 116).

Berdasarkan kenyataan ini, maka bagi sebagian orang proses integrasi Papua ke dalam negara Indonesia lebih merupakan bentuk aneksasi. Oleh karenanya, bagi sebagian masyarakat Papua, bergabungnya Papua ke dalam negara Indonesia bukan merupakan keinginan masyarakat Papua, tetapi lebih merupakan “paksaan” yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan tindakan represif.

Sebagian dari masyarakat Papua yang tidak setuju terhadap proses ini kemudian menuntut kemerdekaan Papua. Kelompok yang menuntut kemerdekaan ini kemudian disebut sebagai kelompok separatis oleh negara. Masyarakat yang pro-kemerdekaan Papua menolak label separatis tersebut. Theys Eluay sebelum dibunuh pada 2001 mengatakan bahwa, Papua bukan separatis sebab mereka tidak secara sukarela bergabung dengan Indonesia (Karma, 2014, xiii). Label separatis yang disematkan kepada orang Papua, kemudian menjadi alasan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua sejak Orde Baru hingga Reformasi saat ini. Label separatis sesungguhnya masih *debatable* apabila merujuk pada sejarah integrasi Papua. Kelompok yang disebut separatis ini kemudian diidentikan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sejak Orde Baru berkuasa, pendekatan militer yang represif menjadi pilihan dalam menangani persoalan di Papua. Wajah Indonesia bagi masyarakat Papua terepresentasikan dalam bentuk aparat keamanan. Selama orde baru berkuasa, rakyat Papua tumbuh bersama dengan teror dan kekerasan dari negara (Pakey, 2018, 116). OPM sering kali dijadikan basis pembenaran dari berbagai tindakan represif dan praktik kekerasan yang dilakukan oleh negara. Walaupun hampir semua orang Papua distigmatisasi sebagai OPM. Kekerasan yang dilakukan oleh negara terus berlangsung sampai masa reformasi. Beberapa kasus kekerasan, semisal peristiwa Abepura berdarah pada 7 Desember 2000, kasus Uncen berdarah pada 16 Maret 2006, tragedi penangkapan 300 peserta Kongres Rakyat Papua pada 19 Oktober 2011, dan penangkapan massal peserta demonstrasi pro-kemerdekaan Papua Mei 2016. Selain itu, tindakan represif juga dilakukan oleh negara dengan menangkap pemimpin politik gerakan sipil rakyat Papua, seperti Filep Karma, Yusak Pakage, Benny Wenda, Selfius Bobi,

Buktar Tabuni, Vicktor Yeimo, Edison Waromi, dan Forkorus Yoboisebut. Bahkan beberapanya dibunuh seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik, Mako Tabuni, Hubertus Mabel, Danny Kogoya, dan Yawen Wayeni. Dalam setiap peristiwa yang disebutkan di atas, keterlibatan dari negara sangat nampak dan tidak bisa untuk dimungkiri (Mambrasar, 2017).

Sejarah mencatat bahwa terjadi peningkatan peristiwa pelanggaran HAM pada tahun 2015 dan 2016, jikalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam periode ini juga terjadi krisis demokrasi di tanah Papua. Berdasarkan laporan *International Coalition for West Papua* (ICP) tahun 2017, sepanjang tahun 2015-2016 terdapat 16 kasus pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan sewenang-wenang dengan 20 orang meninggal dunia. Penyalahgunaan kekuasaan dan senjata api oleh aparat keamanan merupakan penyebab utama dari kasus pembunuhan di luar hukum dan sewenang-wenang sepanjang tahun 2015 hingga 2016. Dalam beberapa kasus, tindakan ini dilakukan sebagai respon atas aktivitas politik atau karena korban berafiliasi dengan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 untuk kasus pembunuhan di luar hukum dan sewenang-wenang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, meskipun juga tidak konstan di setiap tahunnya. Beberapa kasus yang terjadi pada periode ini di antaranya, pembunuhan terhadap Deni Pahabol (17 tahun) yang merupakan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Maret 2015, penembakan oleh Sersan Asher (anggota infantri militer dari Komando Distrik Militer 1710) terhadap sekelompok orang dari Suku Kamoro yang sedang melakukan upacara adat drum dan menewaskan Herman Mairimau dan Yulianus Okoware pada Agustus 2015, dan penembakan terhadap Onesimus Rumayom oleh aparat kepolisian Manokwari dalam aksi unjuk rasa pada Oktober 2016 (ICP Sekretariat dan Budi Tjahjono, 2018, 36-45).

Sedangkan Amnesty International Indonesia (2018) mencatat bahwa terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua antara Januari 2010 sampai Februari

2018. Dari 69 kasus, mayoritas kasus terjadi dalam konteks peristiwa yang tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua, yakni berjumlah 41 kasus. Selain itu, terdapat 28 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan karena berkaitan dengan aktivitas politik, terutama isu tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua. Terdapat 95 korban jiwa dalam kasus dugaan pembunuhan di luar hukum. Dari jumlah tersebut, 85 korban di antaranya merupakan warga etnis Papua. Sementara itu, dari keseluruhan 69 kasus yang terjadi, 34 kasus di antaranya dilakukan oleh pihak kepolisian, 23 kasus dilakukan oleh pihak militer, 11 kasus dilakukan oleh kedua pihak (Polisi dan Militer), serta 1 kasus lainnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Praktik kekerasan seperti yang terjadi di Papua, tidak selayaknya harus terjadi dalam negara yang menganut dan menjalankan paham demokrasi seperti Indonesia. Demokrasi berpijak pada pengandaian dasar bahwa manusia itu setara antara yang satu dengan yang lain. Demokrasi sebagai suatu gagasan politik juga mengandung beberapa prinsip yaitu: (1) penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, (2) setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, (3) diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung, (4) rotasi kekuasaan dari seorang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai, (5) adanya proses pemilu secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih, (6) dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat (Gaffar, 2005, 15).

Dengan melihat realitas kekerasan dan tindakan represif yang terjadi di Papua sejak Orde Baru hingga Reformasi, dan dibandingkan dengan nilai-nilai demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa negara Indonesia tidak konsisten dalam menerapkan demokrasi. Dan Papua adalah pengecualian dari demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan wajah dari

kekuasaan-berdaulat sangat nampak dalam demokrasi. Kekuasaan-berdaulat adalah konsep dari Giorgio Agamben yang menggambarkan kekuasaan yang tidak tertandingi oleh kekuatan apapun karena menempatkan diri sebagai representasi tunggal dari seluruh rakyat. Karena telah merepresentasikan kekuasaan seluruh rakyat, kekuasaan-berdaulat menjadi kekuasaan yang tidak tersentuh. Kekuasaan-berdaulat tidak hanya digunakan oleh Agamben untuk menggambarkan kekuasaan dalam konteks monarki dan totalitarianisme, melainkan juga dalam konteks demokrasi. Masuknya kekuasaan-berdaulat dalam demokrasi melalui normalisasi keadaan-darurat. Keadaan-darurat lazim dipahami sebagai keadaan khusus yang merupakan pengecualian dari normalitas tatanan demokrasi. Dalam keadaan-darurat kekuasaan eksekutif dapat secara sepihak menangguk hukum, mengabaikan prosedur-prosedur konstitusional, membenarkan kekerasan dan mengabaikan hak-hak kebebasan warga negara (Sudibyo, 2019, 6).

Bertolak dari pemikiran Agamben, dalam persoalan Papua Pemerintah Indonesia seringkali melakukan normalisasi keadaan-darurat. Normalisasi keadaan-darurat tampak dalam tindakan negara dalam menghadapi kelompok masyarakat Papua yang dilabel separatis. Demi alasan keamanan negara, banyak masyarakat Papua yang dilabel separatis mengalami pelanggaran HAM. Masyarakat Papua terinklusi serta sekaligus tereksklusi dari tatanan hukum. Masyarakat terinklusi dalam hukum karena sebagai warga negara, mereka diwajibkan untuk patuh dan taat pada hukum. Tetapi, di sisi yang lain masyarakat Papua juga tereksklusi dari tatanan hukum karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dan menjadi korban kekerasan yang mengatasnamakan negara. Kekerasan yang terjadi dimungkinkan karena adanya penanggukan atas hukum dan hukum berada dalam status non-operasional ketika dibutuhkan. Atas nama keamanan negara, orang-orang Papua yang dilabel separatis rentan untuk menjadi korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Oleh karena itu, negara seharusnya konsisten dalam menjalankan demokrasi dan tidak latah untuk menerapkan keadaan-darurat ketika

menangani konflik Papua. Ketika penerapan normalisasi keadaan-darurat selalu ada saat menghadapi konflik, maka pelanggaran HAM akan sangat mungkin terjadi dan negara dapat terjebak dalam kebijakan yang utilitaristis⁵. Keadaan yang demikian, Papua akan tetap menjadi salah satu pengecualian dari demokrasi Indonesia.

PARADOKS PEMBANGUNAN DI TANAH PAPUA

Diskusi seputar pembangunan selalu dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pembangunan kemudian selalu dinobatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kemudian melakukan tindakan yang oleh Tania Murray Li (2012) dinamakan "*the will to improve*". Pemerintah (negara) berupaya menempatkan diri sebagai wali masyarakat, sebuah kedudukan yang diteguhkan oleh klaim bahwa pemerintah yang paling mengetahui bagaimana masyarakat harus hidup, apa yang terbaik bagi masyarakat, dan apa yang dibutuhkan masyarakat melalui intervensi teknis (teknikalisasi permasalahan) pembangunan yang justru gagal mengatasi problem ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan.

Pembangunan di Papua adalah sebuah ironi. Tanah Papua merupakan tanah yang kaya akan hasil alam dan kandungan hasil bumi di dalamnya. Kekayaan alam yang berlimpah, pada kenyataannya tidak membuat masyarakat Papua sejahtera. Berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada pelaksanaannya belum mampu mengoptimalkan kekayaan alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua pada maret 2019 sebesar 27,53%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada Maret 2019 sebesar 22,17%. Dalam skala nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah yang tertinggi jikalau dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

⁵ Kebijakan Utilitaristik adalah kebijakan yang mengorbankan nasib sedikit orang demi kebahagiaan lebih banyak orang.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari kegagalan pembangunan di tanah Papua. Kegagalan ini ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, gagalnya pembangunan di Papua dikarenakan pendekatan yang salah oleh pemerintah dalam melihat persoalan di tanah Papua. Dalam lima tahun terakhir, persoalan di Papua seolah direduksi hanya menjadi persoalan ekonomi dan infrastruktur. Perihal ini begitu nampak dalam program ambisius pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, semisal jalan Trans Papua. Dalam perencanaan, jalan trans Papua memiliki panjang 4.330 km dan berada di Provinsi Papua dan Papua Barat dan ditargetkan akan tersambung seluruhnya pada akhir tahun 2019. Dan pada tahun 2018 jalan yang belum tembus sepanjang 171,7 km.⁶

Dalam pembangunan jalan Trans Papua, ada banyak masyarakat Papua yang harus kehilangan tanahnya. Sedangkan tanah bagi masyarakat Papua adalah sumber penghidupan dan kesatuan masyarakat adat di Papua memiliki relasi historis dengan tanahnya (Suryawan, 2017, 156). Contohnya, masyarakat Nduga melihat pembangunan jalan Trans Papua yang bagi pemerintah bertujuan untuk membuka akses untuk mengangkat keterbelakangan, tetapi bagi masyarakat upaya pemerintah ini sebagai tindakan yang mengacau-acau kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat Nduga memiliki zonasi dalam membagi wilayah hidup mereka yang terdiri dari dataran rendah yang panas dan dataran tinggi pegunungan Lorentz. Dalam sistem zonasi ini, tanah dipisahkan antara pemukiman, kebun, daerah berburu, dan memungut secara horizontal sesuai dengan kondisi tanah dan suhu. Dalam laporan World Wildlife Fund, pemukiman masyarakat berada di daerah paling bawah. Di atasnya terdapat hutan yang dibagi lagi. Ada hutan yang dekat dengan kebun disebut *warik*. Hutan ini akan dipakai apabila kebun akan diperluas dan juga menjadi daerah babi mencari makan. Di atasnya ada hutan *wariknggiyem* yang menjadi tempat menjerat kus-kus, berburu burung, dan

sumber protein lainnya suku Nduga. Di atas hutan *wariknggiyem* ada hutan *kibiari*, tempat banyak tanaman buah merah. Harmoni dari zonasi ini terganggu saat jalan Trans Papua dibangun di daerah itu. Masyarakat Nduga melihat, wilayah mereka berburu menjadi terbuka, demikian juga wilayah memungut dan memelihara babi. Orang luar menjadi bebas untuk masuk di tanah yang merupakan rumah dan hak mereka.⁷

Masifnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua selalu mengusung epistemologi modernisasi sebagai jalan pembebasan dan perubahan sosial bagi masyarakat tradisional Papua dari kondisi keterbelakangan atau kemiskinan, akan tetapi dalam kenyataan justru menimbulkan persoalan baru yang justru menceraibera manusia Papua dari akar budaya dan makna hidupnya (Fakih, 2002). Hal ini membenarkan tesis Berger (2005) yang mengingatkan bahwa “modernisasi menuntut harga yang tinggi pada tingkat makna. Mereka yang tidak bersedia membayar harga yang tinggi ini harus dipandang dan diperlakukan dengan hormat, dan tidak boleh diremehkan sebagai yang terbelakang dan irasional”.

Pola pembangunan seperti ini, pada akhirnya hanya akan membuat masyarakat tercabut dari akar kebudayaannya. Dan pola pembangunan dengan model ini tetap dipertahankan oleh pemerintah sejak Orde Baru hingga Reformasi. Dalam praktik di lapangan pola pembangunan masih dilakukan dengan pendekatan *top-down*. Selain itu, pola pendekatan seperti ini juga menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah, maupun konflik horizontal antara sesama masyarakat Papua. Konflik antara masyarakat dapat terjadi karena kepentingan pembangunan yang sering terrepresentasikan oleh kelompok kapitalis, dapat memanfaatkan kepatuhan masyarakat dalam struktur adat yang masih sangat kental di wilayah Papua. Perihal ini sangat nampak dalam relasi antara tokoh adat dan kelompok kapitalis yang mempunyai kepentingan dalam program pembangunan tersebut. Walaupun jalan Trans-Papua sebenarnya mampu untuk meningkatkan mobilitas dan membuka keterisolasian guna menggerakkan perekonomian, pada

⁶ Lihat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Jalan trans Papua Terus Dibangun, Pemerintah Targetkan 2019 Tersambung Semua*. Di akses pada tanggal 16 September 2019 dari <https://setkab.go.id/jalan-trans-papua-terus-dibangun-pemerintah-targetkan-2019-tersambung-semua/>.

⁷ Bagian ini merupakan hasil ringkasan dari reportase Kompas. Edna C Pattisena, “Dengarkan Suara Nduga”, *Koran Kompas cetak Rabu*, 28 Agustus 2019.

kenyataannya karena pendekatan yang salah malah kontraproduktif terhadap rencana pembangunan. Oleh karenanya, pembangunan memiliki makna yang kurang baik bagi masyarakat Papua, karena pembangunan dipandang sebagai proses pemaksaan nilai-nilai Jakarta kepada orang Papua.

Selain persoalan yang disebutkan di atas, masyarakat Papua juga membutuhkan perlindungan dan penghargaan atas kebudayaannya. Banyak konflik di Papua disebabkan kebijakan dari pemerintah daerah lebih pro terhadap investor tinimbang masyarakat. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Papua dan tanah yang subur menjadikan Papua salah satu pilihan untuk investasi. Masuknya investasi di tanah Papua, sering memunculkan konflik. Konflik terjadi karena investasi yang dilakukan harus merusak hutan-hutan milik masyarakat adat. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Papua memiliki relasi yang kuat dengan alam dan hutannya. Ketika tatanan hidup masyarakat dirusak oleh kegiatan investasi, pada saat yang bersamaan seringkali masyarakat Papua tidak mendapatkan perlindungan. Contohnya yang terjadi pada Suku Moi, distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kehadiran perusahaan kelapa sawit PT Hendrison Inti Persada pada tahun 2004, mengakibatkan suku Moi terancam kehilangan hutan dan tanahnya. Bagi masyarakat suku Moi, hutan mempunyai peran sentral, karena hutan adalah sumber pengetahuan, sumber makanan, dan sumber kepercayaan. Dengan beroperasinya perusahaan sawit, terjadi penebangan kayu liar yang mengakibatkan suku Moi harus kehilangan tempat keramatnya. Selain hilangnya tempat keramat dari Suku Moi, air sungai juga menjadi kotor sedangkan masyarakat bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan investigasi dari ELSAM, tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk melindungi suku Moi dari kerusakan hutannya akibat investasi kelapa sawit. Situasi ini akhirnya tidak hanya mengancam kekayaan alam yang dimiliki oleh suku Moi, tetapi juga mengancam tatanan sosial masyarakat adat suku Moi (Sani, 2016, 27-34).

Program pembangunan yang diharapkan dapat menghadirkan perubahan di tanah Papua,

harusnya ramah dan menghargai kebudayaan masyarakat Papua, terutama orang asli Papua. Mengingat orang asli Papua masih hidup dalam struktur masyarakat adat, sehingga memiliki keterikatan yang erat dengan tatanan kebudayaan. Jangan sampai, program pembangunan menjadi alasan atas alienasi yang terjadi terhadap orang asli Papua. Dan saat ini, alienasi terhadap masyarakat Papua sebenarnya sedang terjadi dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Isu depopulasi orang asli Papua, adalah bukti alienasi terhadap orang asli Papua. Sebagaimana yang dilaporkan dalam buku *Updating Papua Road Map*, bahwa depopulasi orang Papua adalah salah satu sumber konflik yang terjadi di tanah Papua.

Kedua, dalam pembangunan sudah seharusnya masyarakat Papua untuk dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan harus dalam posisi yang setara dengan pemerintah. Keterlibatan yang dimaksudkan di sini adalah partisipasi dari seluruh masyarakat Papua mulai dari proses perencanaan hingga implementasi program-program pembangunan. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat masih sangat minim dalam proses pembangunan karena masih kuatnya stigma bahwa masyarakat Papua itu terbelakang, sehingga tidak bisa untuk dilibatkan dalam pembangunan. Tidak dilibatkannya masyarakat Papua dalam proses pembangunan, akhirnya menjadikan masyarakat Papua sebagai penonton di tanahnya sendiri. Dampak dari tidak terlibatnya masyarakat secara keseluruhan dalam pembangunan akhirnya menjadikan program pembangunan tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dan rentan untuk gagal. Salah satu contohnya adalah produk UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus). UPRM menyatakan bahwa UU Otsus seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan di Papua, karena empat akar masalah di Papua sudah terakomodasi di dalam pasal-pasal UU Otsus. Namun, dalam pelaksanaannya UU Otsus tidak dapat memenuhi ekspektasi pemerintah yaitu menyelesaikan persoalan di Papua. Gagalnya UU Otsus ini dikarenakan UU Otsus tidak memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi UU Otsus rendah karena proses penyusunannya tidak melibatkan secara langsung masyarakat Papua terutama elemen OPM, PDP,

dan kelompok Pro-kemerdekaan Papua. Selain itu, UU Otsus juga tidak mendapatkan legitimasi penuh dari kelompok pro nasionalis Indonesia karena dianggap menyimpan agenda tersembunyi kelompok separatis. Oleh karena itu, kedua pihak baik nasionalis Papua maupun nasionalis Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menyukseskan UU Otsus (Widjojo, 2009, 153). Selain itu, gagalnya UU Otsus juga dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga penggunaan dari dana Otsus tidak tepat sasaran dan tidak memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat.

Melihat kegagalan yang terjadi dalam pembangunan di Papua, sudah seharusnya pemerintah melihat persoalan di Papua dengan perspektif Papua. Ketika pemerintah melihat dan membangun Papua dengan perspektif Jakarta, maka persoalan di Papua tidak akan terselesaikan. Karena kompleksitas persoalan di Jakarta dan Papua sangatlah berbeda. Malah yang akan terjadi, yaitu munculnya masalah baru dan penolakan dari masyarakat atas program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Membangun Papua dengan perspektif Papua, hanya dapat dilakukan dengan syarat utama, menghargai dan menempatkan orang Papua dalam posisi dialog yang simetris. Masyarakat Papua sangat mengharapkan suara mereka untuk didengarkan dan diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan sudah seharusnya pemerintah membangun Papua dengan pendekatan yang lebih humanis dan bukan melalui pendekatan represif. Pendekatan represif dapat memunculkan konflik baru dan menjebak masyarakat Papua dalam trauma kekerasan masa lalu yang berkepanjangan. Penderitaan akibat tindakan kekerasan yang terjadi di masa lalu, harus disembuhkan terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan-pendekatan baru yang lebih humanis. Jikalau tidak, maka potensi konflik akan selalu ada, dan dalam situasi seperti ini maka pembangunan yang diupayakan tidak akan berjalan dengan maksimal. Seperti yang dikatakan oleh Adriana Elisabeth (2012) bahwa setiap program di Papua harus memperhatikan dua kata kunci: Perdamaian dan Pembangunan. Oleh karena perdamaian dan pembangunan saling

berhubungan maka akar persoalan kegagalan pembangunan maupun konflik di Papua harus dipahami secara tepat. Pendekatan pembangunan dan perdamaian di Papua harus mampu mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang ditawarkan, membangun rasa saling percaya (mengurangi kesenjangan perbedaan antara Jakarta dan Papua) dan meningkatkan kepercayaan diri sebagai bagian yang setara dari bangsa Indonesia.

Dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di tanah Papua, diperlukan pula pemberdayaan terhadap masyarakat Papua. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat-martabat masyarakat (Supardan, 2010, 195-196). Untuk pelaksanaan teknisnya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berfokus pada pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan kondisi pendidikan dan kesehatan di tanah Papua yang masih sangat memprihatinkan. Mengingat (1) masih terbatas dan tidak meratanya tenaga pengajar yang berkualitas dan sarana prasarana pendidikan pendidikan serta belum terakomodasinya nilai-nilai budaya Papua dalam kurikulum pendidikan, (2) terbatas dan tidak meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas, terbatasnya sarana-prasarana kesehatan yang berkualitas, rendahnya gizi masyarakat, tingginya angka kematian ibu hamil dan anak, tingginya angka kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), tuberkulosis (TB) dan malaria, serta diskriminasi yang dilakukan petugas kesehatan (Budiarti, 2017). Bertolak dari situasi di tanah Papua, maka pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah syarat utama dan jalan dalam upaya memberdayakan masyarakat Papua.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan langkah untuk mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi pembangunan. Sebagaimana yang tercatat dari hasil penelitian Dr. Ngadisah, MA (2003, vii), mempersiapkan masyarakat sebelum sebuah proyek pembangunan adalah suatu keharusan, karena pelaksanaan pembangunan

yang meninggalkan masyarakatnya, akan berakibat kontraproduktif bagi pembangunan itu sendiri. Hasil-hasil pembangunan fisik dapat dihancurkan dalam waktu singkat bila masyarakat marah karena mereka tidak dapat terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat penting bukan hanya agar mereka dapat menikmati hasil, tetapi keterlibatan dalam setiap proses memberikan kebanggaan, harga diri, dan rasa memiliki.

BANGKITNYA NASIONALISME PAPUA

Ketika berbicara nasionalisme Papua, maka akan merujuk pada masa kolonial Belanda, karena banyak penelitian yang menyatakan bahwa nasionalisme Papua dimulai pada 1920-an. Dalam penelitian Bernarda Meteray, dengan menggunakan konsep “penyemaian”, menyatakan bahwa nasionalisme orang Papua sejalan dengan perkembangan sejarah, budaya, dan relasi masyarakat Papua dengan dunia luar. Penyemaian mulai dirintis pada tahun 1920 oleh IS Kijne, guru yang didatangkan dari zending Belanda. IS Kijne mampu menumbuhkan kesadaran etnis rakyat Papua melalui agama, pendidikan dan kesenian.⁸

Sedangkan tumbuhnya kesadaran akan keindonesiaan di Papua, dipelopori oleh para pengajar di Sekolah Pamong Praja di Jayapura yang didirikan oleh Van Eechoud. Para pengajar di sekolah ini adalah orang Indonesia, seperti Soegoro Atmoprasodjo yang merupakan bekas tawanan Belanda di Boven Digul dan J. Gerungan seorang dokter wanita yang ditunjuk Pemerintah Hindia Belanda sebagai kepala rumah sakit di Hollandia Binnen. Pendidikan di sekolah Pamong Praja ini bertujuan untuk menanamkan nasionalisme Papua. Namun, pada kenyataannya para pengajar yang notabene merupakan orang Indonesia menanamkan juga nasionalisme Indonesia yang anti-Belanda kepada para murid yang adalah orang Papua (Pakey, 2018, 26).

Kesadaran etnis rakyat Papua dan kesadaran akan ke-Indonesia-an kemudian berubah menjadi nasionalisme Papua. Perubahan ini disebabkan

oleh pergumulan politik antara Belanda dan Indonesia, yang kemudian menjadi lahan persemaian nasionalisme Papua dengan munculnya penolakan atas kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh beberapa tokoh Papua dan berdirinya beberapa partai Politik. Pada tahapan inilah mulai tumbuh Papua yang dibayangkan.⁹ Papua yang dibayangkan merujuk pada nasionalisme sebagai sebuah ekspresi politik yang tertuju pada cita-cita politik di masa depan.¹⁰ Karena pada masa ini sudah tumbuh cita-cita Papua yang bebas dari kolonialisme dan dapat menentukan nasibnya sendiri secara bebas.

Menurut Chauvel (dalam Meteray 2012, 19) salah satu faktor penyebab munculnya nasionalisme Papua terletak pada perjalanan sejarah Papua yang menyangkut perbedaan dan persaingan antara orang Papua dan orang Indonesia lainnya, seperti Ambon, Kei, Manado, dan Sangir, baik sebelum Perang Pasifik 1942 maupun selama kurun waktu 1944-1962. Di sisi yang lain menurut Singh, menjelaskan berkembangnya nasionalisme Papua antara lain dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, baik yang menyangkut kontak orang Papua dengan non-Papua, yakni Belanda termasuk aktivitas para misionarisnya, maupun pendudukan Jepang serta peran orang Indonesia sebelum Perang Pasifik tahun 1942 (Meteray, 2012, 20). Nasionalisme Papua sebagai suatu bangsa semakin menguat pasca masa Integrasi Papua ke dalam NKRI. Perihal yang melatarbelakangi menguatnya nasionalisme Papua adalah penolakan dari sebagian masyarakat Papua atas sejarah dari proses integrasi yang dinilai penuh dengan paksaan dan manipulasi. Juga pendekatan kekerasan yang dilakukan rezim Orde Baru dengan alasan nasionalisme.

Bangkitnya nasionalisme Papua merupakan salah satu bentuk dari ambivalensi tindakan represif negara atas konflik yang terjadi di tanah

⁸ M. F. Mukthi “Nasionalisme Dua Sisi” *Hitstoria.com*. Diakses pada tanggal 16 September 2019.

⁹ Papua yang dibayangkan merujuk pada konsep bangsa sebagai komunitas terbayang dari Benedict Anderson. Menurut Benedict Anderson bangsa atau nasion adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa disebut sebagai sesuatu yang terbayang dikarenakan para anggota bangsa terkecil pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain.

¹⁰ Amiruddin al-Rahab “Mengenal Wajah Nasionalisme Papua”. *Kompas.com*. Diakses pada tanggal 16 September 2019.

Papua. Tindakan represif yang dilakukan oleh negara Indonesia merupakan tindakan yang sering mengatasnamakan kedaulatan dan keutuhan Indonesia serta sebagai perwujudan bela negara. Pada situasi ini, kita dapat melihat bahwa terdapat tegangan antara nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Melalui tindakan represif aparat negara, terdapat upaya terselubung untuk memaksakan nasionalisme Indonesia atas Papua.

Menurut Meteray (2012) proses penyemaian nasionalisme Indonesia di Papua menempuh jalan yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Selama periode 1945-1962 Indonesia tidak memiliki wewenang untuk meng-Indonesia-kan orang Papua secara terbuka, karena itu menjadi tidak tuntas dan kurang menjangkau sebagian besar masyarakat Papua. Pasca-1963 proses peng-Indonesia-an orang Papua dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan, karena itu sebagian orang Papua bergabung ke dalam NKRI bukan secara suka rela (Wilson, 2017).

Perihal tindakan kekerasan yang mengatasnamakan nasionalisme terjadi karena adanya pemahaman yang sempit akan nasionalisme dan didorong oleh kesombongan nasionalisme Indonesia. Padahal yang perlu untuk dipahami bahwa nasionalisme suatu bangsa lahir dari sejarah yang berbeda-beda dan kompleks, sehingga tidak bisa untuk dipaksakan dan digeneralisasi. Sayangnya, Indonesia sering terjebak dalam situasi seperti ini karena pemahaman yang keliru akan nasionalisme. Kita dapat melihat bagaimana kesombongan nasionalisme Indonesia melalui tindakan kekerasan atas Timor-Timur dan Papua. Terkait dengan ini Daniel Dhakidae dalam pengantar buku *Imagined Communities* karya Benedict Anderson menulis “Aceh adalah contoh paling berdarah, Papua pentasan paling mengusik nurani dan rasa kemanusiaan, dan akhirnya, tentu saja, Timor Timur adalah contoh paling menyakitkan dan menyiksa dari semuanya” (Anderson, 2001, xiv). Ungkapan ini menegaskan bahwa ambisi nasionalisme Indonesia dibangun dalam pertumpahan darah dan kekerasan. Seharusnya nasionalisme didasarkan pada rasa persaudaraan, dan kesetiakawanan untuk membangun identitas di masa depan. Namun, pada kenyataannya nasionalisme terlalu mudah untuk dikelabui oleh

penguasa dengan modal bela negara¹¹. Sebagai contoh, semangat nasionalisme yang dibangun selama pemerintahan Orde Baru lebih banyak dilandasi oleh pemikiran dan praktik-praktik otoritarianisme dan sentralisme, di mana peranan militer sangat dominan. Mereka berasumsi bahwa melalui cara itu semangat kebangsaan bisa ditumbuhkembangkan. Berbagai gejolak yang muncul di daerah dicap separatis dan ditanggapi dengan tindakan represif, dengan alasan demi menjaga keutuhan NKRI. Berbagai bentuk upaya penyeragaman dan indoktrinasi merupakan upaya membangun nasionalisme. Semua upaya itu tidak hanya kontraproduktif dan mengingkari hakikat kebhinekaan Indonesia, juga gagal mencapai tujuannya (Antoh, 2007, 137).

Kebijakan pemerintah dengan pendekatan represif ketika menghadapi konflik di Papua sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang menekankan kebebasan dan kesetaraan. Melalui tindakan yang represif, kebebasan masyarakat Papua dikekang dan mereka tidak bebas untuk berekspresi serta mengartikulasikan kepentingannya dalam alam demokrasi. Tindakan represif dari negara juga seolah menegaskan bahwa masyarakat Papua berada dalam posisi yang tidak setara dengan masyarakat lain di wilayah Indonesia. Tindakan represif yang terus terjadi semenjak masa integrasi hingga reformasi, menunjukkan bahwa tidak ada kebaruan dalam penanganan konflik di Papua. Tindakan represif oleh negara yang mengakar di tanah Papua kemudian akan membangkitkan “*memoria passionis*” atau ingatan penderitaan dari masyarakat Papua.

Di samping tindakan represif oleh negara yang masih terus terjadi dan tidak adanya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di masa lalu, maka persoalan di tanah Papua semakin menumpuk dan menuntut komitmen dari negara untuk menyelesaikannya. Persoalan di Papua menjadi kian kompleks dengan gagalnya pembangunan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Kegagalan pembangunan dikarenakan pemerintah masih menggunakan perspektif Jakarta dalam mengartikan kebutuhan

¹¹ Uly Mega Septiani, “Komunitas Terbayang ala Indonesia” Didaktikaunj.com. Diakses pada tanggal 17 September 2019.

masyarakat Papua. Alhasil pembangunan dengan alokasi anggaran yang besar, tidak memberikan dampak yang signifikan. Malahan, pembangunan sering menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pemerintah. Boleh dikatakan bahwa pembangunan yang dikembangkan tidak kontekstual dengan kondisi, situasi, dan keadaan masyarakat Papua. Dalam beberapa kasus, program pembangunan yang diharapkan mampu memberikan manfaat malah merusak tatanan budaya masyarakat Papua yang sangat identik dengan tanah, alam dan kebudayaannya. Masyarakat harus kehilangan tempatnya untuk berburu karena masuknya pembangunan jalan Trans Papua, sebenarnya hanyalah salah satu contoh dari model pembangunan yang tidak kontekstual.

Tindakan represif negara yang masih sering terjadi di tanah Papua dan gagalnya pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, akhirnya menjadikan masyarakat Papua terluka secara sosial dan psikis. Secara sosial masyarakat Papua terluka karena ketidakberpihakan sistem negara dalam memenuhi kebutuhan akan hak-hak dasarnya, semisal memperoleh penghidupan yang layak, memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta rasa aman dalam lingkungan sosial. Sedangkan secara psikis, masyarakat Papua terluka karena praktik kekerasan yang terus terjadi di tanah Papua hingga saat ini. Berkenaan dengan sejarah tindakan kekerasan yang terjadi di Papua, tokoh agama Katolik, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM mengatakan bahwa semenjak jatuhnya rezim Presiden Soeharto dan memulai Reformasi di negara Indonesia, kekerasan terus bertambah, termasuk di tanah Papua terus meningkat kekerasan dan semakin brutal. Rezim Orde Baru dipersalahkan sebagai faktor penyumbat bertahun-tahun membungkam dan memasung hak rakyat (Pakey, 2018, 275). Tindakan kekerasan yang terus berulang di tanah Papua kemudian melahirkan trauma, ketakutan, dan depresi bagi masyarakat Papua, terutama mereka yang menjadi korban dari tindakan kekerasan. Rasa terluka, kesamaan penderitaan, dan kuatnya ikatan sebagai suatu bangsa menjadi alasan bangkitnya nasionalisme Papua. Bangkitnya nasionalisme Papua tergambar secara

jelas dalam gerakan-gerakan perlawanan yang menuntut keadilan di tanah Papua. Gerakan perlawanan ini semakin menguat ketika, Reformasi 1998 berhasil menumbangkan rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Tidak dapat dimungkiri bahwa tumbangnya Soeharto, turut juga membangkitkan optimisme masyarakat Papua untuk berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi secara masif di tanah Papua dan lebih terbuka dengan mobilisasi massa yang lebih besar ke jalan-jalan. Menurut ELSAM sebagaimana dicatat dalam buku UPRM, pada tahun-tahun pertama setelah kejatuhan Soeharto, orang Papua dibebaskan untuk mengekspresikan aspirasi dan perasaan mereka yang telah lama terpendam termasuk melakukan protes dan bahkan menuntut kemerdekaan (Wilson, 2017, 98).

Demokratisasi yang terjadi pasca rezim orde baru pada tahun 1998, turut mempengaruhi kaum muda Papua yang mayoritas bersekolah di luar Papua untuk menemukan pola perjuangan dan membentuk nasionalisme Papua yang baru. Pola perjuangan kaum muda Papua sangat dipengaruhi oleh gerakan mahasiswa 1998 dari kelompok militan di Indonesia. Perjuangan dari kaum muda Papua ini telah mentransformasi suatu bentuk nasionalisme baru yang lebih inklusif (Wilson, 2017, 129). Nasionalisme ini berbeda dengan nasionalisme dari generasi sebelumnya yang bersifat eksklusif dan berbasis pada ikatan kultural.

Nasionalisme Papua yang dibentuk oleh kaum muda dikatakan inklusif karena kebangsaan Papua mulai didefenisikan oleh kaum muda Papua, tidak saja dalam identitas kesukuan dan ras tetapi juga dalam identitas bangsa dan rakyat tertindas dalam sistem ekonomi-politik global yang bernama kapitalisme. Dimensi-dimensi ekonomi-politik yang menindas bangsa Papua membuat nasionalisme baru ini lebih berwatak kelas, dan segera bersemai menjadi embrio identitas kolektif gerakan perlawanan kaum muda. Nasionalisme “bangsa tertindas” ini berbeda dengan nasionalisme kultural yang kental dengan primordialisme dan kargoisme. Nasionalisme Papua bukan nasionalisme sempit, primordial, dan etnosentris, tetapi nasionalisme bagi semua manusia yang ada di Papua, melindungi pluralisme, gender, lingkungan, dan pro-kemanusiaan. Menurut kaum muda, nasionalisme yang berbasis

pada perbedaan warna kulit atau rasisme dan stereotip itu adalah warisan dari kolonialisme (Wilson, 2017).

Nasionalisme yang dijiwai oleh kaum muda Papua, juga turut mempengaruhi pola perjuangan yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokratis dan partisipatoris. Misalnya, strategi dari KNPB yang memediasi rakyat untuk mendirikan dan bergabung dalam Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di 23 Kabupaten/kota di Papua. Pola perjuangan dari kaum muda ini, tentunya sangat berbeda dengan generasi sebelumnya dengan nasionalisme yang masih didasarkan pada ikatan-ikatan kultural yang sarat dengan primordialisme dan bersifat eksklusif. OPM pada masa Seth Rumkorem dan Jacob Prai, adalah contoh organisasi perjuangan dengan latar belakang nasionalisme yang bersifat eksklusif, karena ruang partisipasi bagi rakyat untuk terlibat sangat kecil dan perjuangan dilakukan secara tertutup. Berbeda dengan kelompok muda yang mengusung nasionalisme yang inklusif seperti KNPB, masyarakat luas dilibatkan dalam perjuangan dan tidak bergerak dalam ruang kelembagaan tradisional. Akan tetapi, kelompok kaum muda mencoba untuk mengorganisir kelompok sosial yang lebih beragam. Nasionalisme dari kaum muda yang inklusif seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun komunikasi dan mengusahakan dialog atas konflik di Papua. Namun, dalam menanggapi nasionalisme dari kaum muda Papua, pemerintah masih tetap menggunakan cara-cara represif yang melanggar HAM dan hak demokratis yang dijamin oleh UUD 1945 (Wilson, 2017).

Suara-suara kritis yang mengkritik pemerintah, seringkali dibungkam dengan label separatis yang dibuat oleh negara. Karena dianggap separatis, tidak ada perlindungan hukum dalam status mereka sebagai warga negara, sehingga seolah ada pembenaran untuk tindakan kekerasan negara atas mereka yang dilabel separatis. Tindakan represif selalu dibenarkan dengan narasi demi keadilan negara dan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kesatuan dan persatuan Indonesia. Pendasaran argumentasi seperti ini, dapat digunakan sebagai pembenaran atas term minoritas dan mayoritas serta terdapat

kesenjangan antar keduanya. Walaupun kita sering mendengar pernyataan pemerintah Indonesia bahwa di negara ini semua orang diperlakukan sama dan setara, melampaui sekat-sekat minoritas dan mayoritas.

Gerakan-gerakan sosial yang ada di Papua merupakan manifestasi dari rasa nasionalisme bangsa Papua. Nasionalisme ini lahir karena adanya konflik berkepanjangan, gagalnya pembangunan, dan tindakan represif negara. Oleh karenanya persoalan yang terjadi di Papua tidak dapat diselesaikan dengan tindakan represif. Karena tindakan tersebut hanya akan semakin memperparah situasi di tanah Papua. Perlu langkah yang lebih humanis dengan tidak menggunakan senjata dalam penyelesaian konflik Papua. Masyarakat harus diberikan kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat, agar pemerintah dapat mengetahui perihal apa saja yang menjadi kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat Papua. Pemerintah dituntut juga untuk memfasilitasi forum yang mempertemukan masyarakat Papua dan pemerintah guna membahas masalah-masalah yang terjadi di Papua dan merumuskan secara bersama-sama jalan keluar atas persoalan konflik di tanah Papua. Menurut Sidney Jones dalam laporan "*Radikalisasi dan Dialog di Papua*" memperingatkan bahwa semakin lama Jakarta menolak untuk membahas masalah-masalah itu, semakin radikal tuntutan yang akan muncul.¹²

PENUTUP

Upaya penyelesaian problem Papua sudah banyak ditawarkan oleh para akademisi dan pemerhati masalah kemanusiaan dan keadilan di Indonesia. Akan tetapi menurut penulis, ada tawaran solusi yang jauh lebih kritis-progresif dan humanis. George Hormat (2019), menawarkan solusi yang menarik yakni : Pancasila dapat dijadikan sebagai *leitstar* (bintang penuntun) sekaligus *leitmotiv* (dorongan pokoknya) dalam penyelesaian problem Papua, yakni : sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.¹³

¹² Farid Husain, "Menuju Dialog Papua" *Harian Kompas*. Edisi Kamis, 12 September 2019

¹³ George Hormat, "Menjadikan Pancasila sebagai "Leitstar" Penyelesaian Masalah Papua". Artikel (Online), Kompasiana.com. Diakses pada, minggu 29 september 2019.

Pertama, menyelesaikan problem Papua dalam bingkai sosio-nasionalisme. Pendekatan sosio-nasionalisme mengedepankan semangat kebangsaan, kemanusiaan dan dialog yang partisipatif. Kebangsaan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus pula diimbangi dengan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan yang mengutamakan kebangsaan di atas kemanusiaan akan berujung penggunaan kekerasan dalam menangani keresahan dan aspirasi rakyat Papua. Pendekatan kebangsaan *an sich* inilah yang sejak dahulu, dan cenderung dipertahankan hingga kini dalam meredam keresahan dan aspirasi orang-orang Papua. Padahal sudah terbukti, sejak Timor Leste, Aceh, dan Papua, pendekatan represi militer bukan saja tidak mampu menyelesaikan problem, malah memperluas dan memperdalam sentimen separatis. Prinsip kemanusiaan atau internasionalisme berarti memandang orang-orang Papua sebagai sesama saudara, sesama umat manusia. Tentu saja itu berarti setara derajatnya, setara hak-haknya, setara martabatnya dengan etnis dan penduduk pulau atau provinsi manapun di Indonesia. Memandang Papua dengan kacamata kemanusiaan berarti bukan wilayah geografis Papua yang harus dirangkul; bukan kekayaan tambangnya, bukan hutan-hutan yang bisa dipersembahkan bagi investor sawit yang harus dicintai, melainkan manusia, orang Papua.

Kedua, sosio-demokrasi adalah perasan dari prinsip demokrasi politik dan keadilan sosial. Demokrasi politik asli Indonesia adalah demokrasi musyawarah, dialog, bertukar pikiran, gagasan agar saling memahami sehingga tercipta mufakat. Oleh karena setiap kelompok masyarakat baik suku-suku, agama, kaum perempuan, kaum muda di Papua harus dilibatkan secara aktif dalam dialog dan dalam pengambilan kebijakan public disemua aspek pembangunan di tanah Papua. Sosio-demokrasi juga berarti demokrasi politik harus dibarengi demokrasi ekonomi, demokrasi yang mencegah penguasaan sumber daya agraria, sumber daya alam, dan aset produksi strategis berada di tangan segelintir elit ekonomi. Wujud dari adanya demokrasi ekonomi adalah keadilan sosial. Proses pembangunan harus menempatkan massa-rakyat Papua sebagai subyek politik dengan mempertimbangkan hak massa-rakyat Papua

atas sumber daya alam (tanah, hutan, hewan, dan lainnya) sebagai sumber hidup dan kehidupan.

PUSTAKA ACUAN

- Al-Rahab, Amiruddin. (2012, 12, 16). Mengenal wajah nasionalisme Papua. *Kompas.com*. Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/16/0340364/mengenal.wajah.nasionalisme.papua?page=all>.
- Amnesty International. (2018). “*Sudah, kasi tinggal dia mati*”: pembunuhan dan impunitas di Papua. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Anderson, Benedict. (2001). *Imagined communities*. Omi Intan Naomi (Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press.
- Antoh, Demmy. (2007). *Rekonstruksi & transformasi nasionalisme Papua*. Jakarta Timur: Pustaka Sinar Harapan.
- Berger, Peter. (2005). *Piramida kurban manusia*. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Budiarti, Aisah Putri. (2017). Relevansi Papua road map dan tawaran gagasan untuk Papua. Rusdiarti, S. Riella & Pamungkan, Cahyo. (Ed). *Updating Papua road map: proses perdamaian, politik, kaum muda, dan diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, LIPI.
- Elisabeth, Adriana. (2012). Perdamaian dan pembangunan Papua: Problematika politik atau ekonomi? *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 9. Nomor 1, 19-32.
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist.
- Gaffar, Afan. (2005). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hormat, George. (2019, 08, 21). Menjadikan Pancasila sebagai “Leitstar” Penyelesaian Masalah Papua. *Kompasiana.com*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/tilariapadika/5d5d-627e097f364b785c5b93/menjadikan-pancasila-sebagai-leitstar-penyelesaian-problem-papua?page=all>.
- Husain, Farid. (2019, 12, 09). Menuju dialog Papua. *Koran Kompas cetak*.
- ICP Sekretariat dan Tjahjono, Budi. (2018). *Hak Asasi Manusia di Papua 2017: laporan kelima dari koalisi Internasional untuk Papua (ICP) yang meliputi kejadian sepanjang bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016*. Fransisca K. (Penerj.). Jerman: International Coalition for Papua (ICP).

- Karma, Filep. (2014). *Seakan kitorang setengah bintang: Rasialisme Indonesia di tanah Papua*. Jayapura: Penerbit Deiyai.
- Li, Tania Murray. (2012). *The will to improve: Perencanaan, kekuasaan dan pembangunan di Indonesia*. Serpong: Marjin Kiri.
- Mambrasar, Yohannis. (2017). *Meningkatnya represi terhadap kebebasan berkespresi di tengah menguatnya aspirasi kemerdekaan papua*. Diakses dari https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15280&keywords=kebebasan.
- Materay, Bernarda. (2012). *Nasionalisme ganda orang Papua*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Mukthi, M. F.. Nasionalisme dua sisi. *Historia*. Diakses dari <https://historia.id/politik/articles/nasionalisme-dua-sisi-v2L16>.
- Ngadisah. (2003). *Konflik pembangunan dan gerakan sosial politik di Papua*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Raja.
- Pakey, Frans. (2018). *Papua mencari jalan perdamaian: Telaah konflik dan resolusi di bumi cenderawasih*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Pattisena, Edna C. (2019, 08, 28). Dengarkan suara Nduga. *Koran Kompas cetak*.
- Sani, Simon Oriengel. (2016). Suku Moi terancam kehilangan hutan, tanah, dan tempat keramat. Adiani Viviana, et.,al. (Ed). *Pembela HAM menulis: Bunga rampai pendokumentasian situasi HAM di tanah Papua*. ELSAM.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2019). Jalan trans Papua terus dibangun, pemerintah targetkan 2019 tersambung semua. Diakses dari <https://setkab.go.id/jalan-trans-papua-terus-dibangun-pemerintah-targetkan-2019-ter-sambung-semua/>.
- Septiani, Uly Mega. (2017, 07, 25). Komunitas terbayang ala Indonesia. *Didaktikaunj.com*. Diakses dari <https://didaktikaunj.com/2017/07/25/%E2%80%8Bkomunitas-terbayang-ala-indonesia/>.
- Sudibyo, Agus. (2019). *Demokrasi dan kedaruratan: Memahami filsafat politik Giorgio Agamben*. Serpong: Marjin Kiri.
- Supardan, Dadang. (2010). Alienasi sosial dan budaya masyarakat Papua: Sebuah refleksi. *Jurnal Ilmu Politik*. Edisi 21, 189-212.
- Widjojo, M. S. (Ed). (2009). *Papua road map: Negotiating the past improving the present, and securing the future*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yayasan TIFA, LIPI.
- Wilson. (2017). Transformasi gerakan kaum muda Papua. Rusdiarti, S. Riella & Pamungkas, Cahyo. (Ed). *Updating Papua road map: proses perdamaian, politik, kaum muda, dan diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, LIPI.

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

